



# Dwi Temukan Penyimpangan Dana BOS

## ■ Kumpulkan Kepala Disdik se-Riau di Pekanbaru

PEKANBARU, TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno memanggil seluruh kepala Dinas Pendidikan dan bendaharawan yang bertanggungjawab terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana tersebut oleh pihak yang tak bertanggungjawab. "Akan dipanggil semuanya dari seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau. Kita minta keterangan dari mereka apakah benar dugaan itu," kata Dwi, Selasa (24/6).

Dia berjanji, jika ditemukan penyelewengan dana BOS, akan dilaporkan ke pihak berwajib dan diproses hukum. "Kalau memang ada akan kita serahkan pada proses hukum. Karena itu sudah melanggar hukum dan aturan Permendiknas Nomor 101 tahun 2013," imbuhnya.

Dwi mengatakan, dalam Permendiknas itu sudah diatur tata cara penyaluran dan cara menyalurkan dana yang sebagiannya berasal dari APBN. Sehingga jika bertentangan dengan Permendiknas akan diproses sesuai hukum.

"Kita ingin penyalurannya itu sesuai dengan aturannya dan



**” Kita ingin penyalurannya itu sesuai dengan aturannya dan tidak ada penyelewengan. Jadi ketika ada penyelewengan tidak ada kata ampun akan diproses sesuai hukum berlaku ”**

**DWI AGUS S**  
Kepala Disdik Riau

tidak ada penyelewengan. Jadi ketika ada penyelewengan tidak ada kata ampun akan diproses sesuai hukum berlaku dan tidak pandang bulu,” tegas Dwi.

Sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau menemukan dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di beberapa wilayah kabupaten/kota.

“Kejanggalan itu kami temukan saat melakukan peninjauan langsung ke sekolah-sekolah di tiap kabupaten dan kota,” kata Dwi.

Menurut dia, ada berbagai macam temuan kejanggalan itu. Salah satunya yakni dana BOS yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, malah melenceng untuk memperkaya diri oknum pengelola sekolah.

Kemudian, ada juga dana

BOS yang digunakan untuk kepentingan bersama, namun keluar dari jalur yang seharusnya.

Temuan-temuan itu, katanya, akan dievaluasi karena peruntukannya sudah tidak tepat sasaran serta melenceng dari ketentuan yang berlaku.

“Karena kalau dibiarkan, dana BOS justru akan mendatangkan kekeruhan di dunia pendidikan dan dapat berpotensi mendatangkan kecacauan,” katanya.

Salah satu poin evaluasi yang dimaksud, kata dia, seluruh dinas pendidikan di tiap kabupaten/kota harus melakukan pengawasan ekstra hingga ke sekolah-sekolah. “Jangan sampai, dugaan ini menjadi pelanggaran hukum yang akan memperburuk dunia pendidikan Riau,” tutup dia. (uha)